

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT PADA PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA CIMAHI

Intan Nur Komala¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi PERMENDAGRI No 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas resmi ditujukan khusus untuk anak 0 sampai dengan dibawah umur 17 tahun dan belum menikah yang hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten/Kota. bertujuan meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan, pemenuhan hak konstitusional warga negara dan menjamin anak. kurangnya tingkat kesadaran masyarakat pada Program Kartu Identitas Anak menyebabkan masyarakat kurang sadar akan kebutuhan dari tujuan, manfaat, fungsi dari Kartu Identitas Anak, masyarakat hanya menganggap sebagai identitas resmi untuk anak tanpa mengetahui tujuannya. Penelitian menggunakan teori strategi *Geoff Mulgan* dengan lima dimensi: Tujuan, Lingkungan, Arah, Tindakan, Pembelajaran. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini belum berjalan dengan baik, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan tujuan pentingnya Kartu Identitas Anak, masyarakat hanya menganggap kartu identitas anak ini sebagai kartu yang tidak dipergunakan. Namun beberapa cara dan upaya telah sering dilakukan guna untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya Kartu Identitas Anak yang di mana telah melakukan beberapa upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat, jemput bola, *three in one* (3 in 1), kolektif, dan melakukan kerja sama dengan kelurahan dan kecamatan.

Kata Kunci: Strategi, Kesadaran Masyarakat, Kartu Identitas Anak, Tujuan, Sosialisasi, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Abstract

This research is motivated by Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016, which provides an official identity card specifically for unmarried children aged 0 to 17 years old. It can only be issued by the Regency/City Population and Registration Office. The goal is to improve data collection, public protection, and services, as well as to protect and fulfill citizens' constitutional rights and ensure children's well-being. Lack of public awareness of the Child Identity Card Program has led to a lack of awareness of the need for, purpose, benefits, and function of the Child Identity Card.

The public only considers it an official form of identification for children without understanding its purpose. The study employed Geoff Mulgan's strategic theory with five dimensions: Purpose, Environment, Direction, Action, and Learning. The research method was descriptive qualitative, with data collection techniques using in-depth interviews, participant observation, and literature review. The results of this study indicate that this program has not been running well. Many people are still unaware of the importance of the Child Identity Card and simply consider it an unused card. However, several methods and efforts have often been carried out to raise public awareness of the importance of Child Identity Cards, which have involved several efforts such as community outreach, proactive outreach, three in one (3 in 1), collective action, and collaboration with sub-districts and districts.

Keywords: Strategy, Public Awareness, Child Identity Card, Objectives, Socialization, Population and Civil Registration Service.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan nasional. Melalui sistem administrasi kependudukan yang tertib, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat berdasarkan data yang akurat. Salah satu wujud nyata dari tertib administrasi kependudukan adalah pemberian identitas kepada setiap warga negara, termasuk anak-anak. Hal ini diterapkan melalui program Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. dengan memberikan dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak.

Karena Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak hanya memberikan status, keabsahan, legalitas, dan kewarganegaraan kepada anak, kebijakan yang diperlukan untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak diperlukan. Salah satu manfaat Kartu Identitas Anak adalah sebagai kartu tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak yang berusia 17 tahun kebawah. KIA juga akan ditargetkan untuk menjadi salah satu persyaratan pendaftaran sekolah, sebagai dasar pembuatan KTP, untuk mengklaim santunan kematian bagi pemilik KIA yang berusia 17 tahun kebawah, mencegah perdagangan anak, dan memenuhi berbagai keperluan terkait lainnya yang membutuhkan bukti identitas berupa kartu identitas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Nomor 2 Nomor 2 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA) merupakan salah satu jenis peraturan negara yang berkaitan dengan pencatatan, perlindungan, dan

pemantauan informasi publik. Untuk anak-anak yang belum menikah dan berusia antara 0 dan 17 tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten atau kota menerbitkan KIA. Setiap anak diberikan identitas pribadi sejak lahir, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, sesuai dengan Pasal 35 Pasal 27(1) dan (2) Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin bahwa data anak terhubung dengan sistem kependudukan nasional, KIA dimaksudkan untuk dijadikan KTP bagi anak-anak yang belum berusia 17 tahun dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK). Kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 2016 menetapkan Program dapat Tanda Penduduk Anak (KIA).

Melalui kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah berharap adanya program Kartu Identitas Anak (KIA) ini mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. Sejak diluncurkan pada tahun 2016. Kota Cimahi terpilih dan sudah menjadi salah satu kota percontohan untuk implementasi program Kartu Identitas Anak. Jika melihat dari program Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Cimahi, rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak dikarenakan partisipasi dan kesadaran masyarakat Kota Cimahi yang masih belum mengerti akan pentingnya dokumen Kartu Identitas Anak tersebut bagi anak-anak mereka kedepannya. Masyarakat masih belum menganggap KIA sebagai dokumen kependudukan yang penting. Meskipun sebenarnya program ini sudah disosialisasikan oleh pemerintah, namun masyarakat masih belum sadar.

Namun, hal ini masih menjadi polemik yang di mana sosialisasi kepada perwakilan masyarakat tidak dapat tersampaikan kepada masyarakat lainnya. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait aktivasi identitas kependudukan khususnya Kartu Identitas Anak dikarenakan masih belum optimalnya strategi yang dimiliki pemerintah Kota Cimahi. Selain itu, masyarakat juga belum memiliki kesadaran penuh untuk mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Fenomena yang terjadi di Kota Cimahi terkait Kartu Identitas Anak yaitu belum meratanya informasi mengenai sosialisasi mengenai Kartu Identitas

Anak. Pemerintah Kota Cimahi harus bisa memastikan bahwa lingkungan yang telah mendapatkan sosialisasi tersampaikan informasinya secara merata.

Belum adanya evaluasi tahunan program Kartu Identitas Anak. Pemerintah Kota Cimahi tidak hanya mempelajari sistematika dalam program Kartu Identitas Anak, namun perlu juga dilakukan pemikiran ulang atas tujuan dan arah yang dipilih terkait program Kartu Identitas Anak. Penelitian menggunakan teori strategi Geoff Mulgan dengan lima dimensi: 1. Tujuan (purposes) 2. Lingkungan (environment) 3. Pengarahan (directions) 4. Aksi (action) 5. Pembelajaran (learning)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Program Kartu Identitas Anak Di Kota Cimahi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menelaah fenomena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tujuan, fungsi, manfaat pada kartu identitas anak di Kota Cimahi. pada kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, analisis data bersifat induktif, serta menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait pengalaman, persepsi, dan penilaian informan terhadap strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses tujuan, fungsi, manfaat. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan penelitian.

Berdasarkan metode penelitian yang dimaksud, peneliti berfokus untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Program Kartu Identitas Anak Di Kota Cimahi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Utara. sedangkan subjek penelitian meliputi Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Operator Sistem Informasi Administrasi ke-pendudukan Terampil, Kasi Pelayanan Umum Kecamatan, masyarakat Kota Cimahi sebagai penerima layanan. Informan ditentukan secara purposive, berdasarkan peran, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan maupun penerimaan pelayanan kesehatan.

PEMBAHASAN

Dalam menganalisis strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Program Kartu Identitas Anak (KIA), penelitian ini menggunakan teori strategi dari Geoff Mulgan yang terdiri dari lima dimensi, yaitu tujuan (*goals*), lingkungan (*environment*), arahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*).

A. Tujuan (*purposes*)

Kejelasan pencapaian tujuan yang ingin dicapai ini langkah yang harus diperhatikan bahkan direncanakan sebelumnya agar rencana yang sudah di rancang dapat berjalan dengan lancar. Dalam melindungi dan mensejahterakan anak serta memantau penduduk usia anak, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak sebagai kartu identitas diri bagi anak. Kartu Identitas Anak diperuntukan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIADK).

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah, yaitu: mendorong terpenuhinya hak sipil anak, mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sebagai Kartu Identitas bagi Anak yang berdomisili di Kota. Sedangkan tujuan diberikan Kartu Identitas Anak adalah untuk

meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

Secara administratif pemerintah telah menyediakan akses pelayanan yang mudah, dan gratis. peneliti mengamati adanya ketimpangan antara ketersediaan layanan dengan di lapangan, KIA belum dipandang sebagai sebuah kebutuhan primer (mendesak). Sebagian besar orang tua hanya menganggap KIA sebagai "dokumen tambahan" yang belum memiliki fungsi operasional harian yang cukup jelas, berbeda dengan KTP-el yang wajib dimiliki untuk akses perbankan, pekerjaan, maupun perjalanan. Sehingga rendahnya minat masyarakat bukan disebabkan oleh sulitnya prosedur, melainkan karena belum adanya "keterpaksaan administratif." Hal ini diperkuat dengan fakta di lapangan bahwa masyarakat baru akan bergerak mengurus dokumen jika ada hubungan kepentingan pribadi yang mendesak atau syarat yang mewajibkan dokumen tersebut ada.

B. Lingkungan (*environment*)

Lingkungan merupakan faktor penting dalam pencapaian strategi yang dilakukukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kebijakan pemerintah terutama pemerintah Daerah. Besarnya jumlah penduduk Indonesia menyebabkan permasalahan di berbagai bidang sering terjadi sehingga menuntut pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak nya sebagai warga negara. Dari jumlah yang berarti dari total populasi sekitar 581.994 jiwa, sekitar 127.000 jiwa. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan.

Bahwa antusiasme masyarakat ini bersifat pasif-pragmatis artinya, masyarakat senang memiliki KIA jika prosesnya dilakukan secara kolektif (oleh sekolah, RT, atau kader) dan gratis, Sebaliknya, jika harus mengurus secara mandiri ke kantor kecamatan tanpa ada kebutuhan mendesak, minat masyarakat menurun drastis karena dianggap tidak efisien.masyarakat menganggap KIA hanya sebagai "pajangan dompet." . Hal ini menjadi tantangan besar karena lingkungan eksternal belum menciptakan mewajibkan kepemilikan kartu tersebut, bahwa efektivitas KIA sangat bergantung pada regulasi di tingkat pusat (Kementerian).

Selama KIA belum diintegrasikan secara nasional sebagai syarat wajib layanan publik (seperti BPJS atau syarat masuk sekolah), maka tekanan dari lingkungan eksternal untuk memiliki KIA akan tetap lemah. Masyarakat masih melihat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) sebagai dokumen yang jauh lebih sakti dibandingkan KIA.

C. Pengarahan (*directions*)

Pengarahan dalam strategi merujuk pada proses memberikan arahan atau petunjuk kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan penentuan visi, misi, dan tujuan pemerintah, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan pengarahan yang jelas, pemerintah dapat bekerja secara terarah dan efektif dalam mencapai kesuksesan. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang untuk mengarahkan, menggerakkan, membimbing dan mengatur segala sesuatu dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang atau masa sekarang. Pengarahan ini dapat secara persuasif atau bujukan institusi. Dalam pembahasan ini peneliti menjabarkan bagaimana pengarahan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Cimahi.

Koordinasi antara Disdukcapil dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan telah berjalan secara sistematis, Disdukcapil bertindak sebagai pemegang kebijakan, anggaran, dan otoritas teknis (pencetakan), sementara pihak Kecamatan dan Kelurahan memposisikan diri sebagai "perpanjangan tangan" atau "mitra". Kecamatan dan Kelurahan memiliki peran vital sebagai fasilitator komunikasi, Hal ini menunjukkan bahwa jalur koordinasi secara struktural sudah terbentuk dengan baik hingga ke tingkat bawah.

Adanya koordinasi lintas sektor yang cukup efektif antara Disdukcapil dengan pihak Sekolah (PAUD/TK/SD). Pola pelayanan kolektif ini merupakan bentuk koordinasi stakeholder yang paling nyata hasilnya di lapangan. Dengan melibatkan pihak sekolah, pemerintah berhasil memotong jalur birokrasi yang biasanya harus ditempuh secara mandiri oleh orang tua. Koordinasi ini terbukti menjadi kunci utama dalam upaya

pencapaian target kepemilikan KIA di Kota Cimahi. Seringkali aspirasi masyarakat yang ditampung oleh Kecamatan hanya berhenti sebagai laporan, karena kebijakan strategis mengenai manfaat dan fungsi KIA tetap berada di level kementerian atau dinas pusat.

D. Aksi (*action*)

Dalam strategi, "aksi" merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan strategi yang telah dirumuskan. Hal ini melibatkan pelaksanaan rencana, keputusan, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam strategi tersebut. Aksi dalam strategi penting untuk mengubah rencana menjadi kenyataan dan mencapai hasil yang diinginkan.

Tindakan pemerintah daerah telah membuahkan hasil yang terukur dari sisi angka kepemilikan. Melalui mekanisme pelayanan kolektif dan jemput bola di sekolah-sekolah, terjadi peningkatan jumlah anak yang memiliki KIA setiap tahunnya. Tindakan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya pasif menunggu di kantor, tetapi aktif melakukan kunjungan ke kantong-kantong sasaran (sekolah), yang terbukti menjadi tindakan paling efektif sejauh ini. meskipun tindakan operasional pencetakan berjalan baik, namun tindakan edukasi/sosialisasi dirasakan belum merata. Peneliti menemukan adanya keluhan dari tingkat kewilayahan mengenai minimnya kegiatan sosialisasi khusus KIA dalam setahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan pemerintah masih lebih fokus pada aspek output (jumlah kartu yang tercetak) daripada aspek outcome (pemahaman masyarakat akan fungsi kartu). Kecamatan dan Kelurahan telah menjalankan tindakan pembantuan dalam pengumpulan berkas dan pendataan warga secara bertahap. Namun, tindakan ini masih bersifat teknis-administratif; belum banyak ditemukan tindakan inovatif yang mandiri di tingkat kecamatan untuk memberikan nilai tambah pada fungsi KIA.

E. Pembelajaran (*learning*)

Belajar atau evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengukur dan sumber lain secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang telah di rencanakan sebelumnya dan rencana Strategi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil. Dimana hasil evaluasi tersebut dimasukan menjadi umpan balik atau tolak ukur untuk perencanaan yang akan di lakukan kedepannya. Berkaitan dengan pengarah dan pelaksanaan, belajar disini merupakan suatu tahapan evaluasi setelah melakukan pengarah dan pelaksanaan, terkait strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah secara rutin melakukan evaluasi rutin secara triwulan atau tiga bulan sekali terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terhadap pelaksanaan program Kartu Identitas anak.

Evaluasi yang dilakukan dalam pelayanan bersifat masih menyeluruh terhadap seluruh pelayanan administrasi kependudukan. Belum ditemukan adanya forum evaluasi yang spesifik dan mendalam . Akibatnya, isu-isu mendasar seperti rendahnya nilai manfaat KIA di mata orang tua belum terselesaikan secara tuntas karena tercampur dengan evaluasi KTP-el atau Kartu Keluarga yang dianggap lebih prioritas. adanya penggunaan instrumen evaluasi sesuai amanat PANRB No. 14 Tahun 2017, yaitu melalui survei kepuasan masyarakat berbasis Google Form dan Forum SKPD. Evaluasi baru sebatas menilai "kepuasan pelayanan" (keramahan petugas, kecepatan cetak), bukan "evaluasi efektivitas program" (apakah kartu tersebut berguna di lapangan). masyarakat tidak mengetahui adanya proses evaluasi atau sosialisasi hasil perbaikan program. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa program berjalan apa adanya tanpa ada peningkatan manfaat nyata dari tahun ke tahun. dengan mewajibkan penggunaan KIA di sektor eksternal (Dinas Pendidikan/Kesehatan). menjadikan KIA syarat wajib, maka tingkat kesadaran masyarakat akan tetap rendah karena tidak adanya konsekuensi administratif jika tidak memilikinya.

KESIMPULAN

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada program Kartu Identitas Anak (KIA) telah dilaksanakan secara terencana dan terarah.

Ditinjau dari teori strategi publik Geoff Mulgan, strategi ini telah memenuhi unsur-unsur efektivitas melalui kejelasan tujuan dalam meningkatkan cakupan kepemilikan KIA, serta penguatan kolaborasi antaraktor melalui pendekatan jaringan (*network strategy*) yang melibatkan kecamatan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Selain itu, Disdukcapil Kota Cimahi berhasil menunjukkan adaptasi dan inovasi pelayanan melalui sistem "jemput bola" serta integrasi layanan yang mendekatkan akses administrasi kependudukan kepada masyarakat. Namun, meskipun secara konseptual strategi tersebut sudah berjalan baik, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat akan urgensi KIA, keterbatasan sumber daya manusia, serta intensitas sosialisasi yang belum merata. Hal ini menyebabkan capaian program belum sepenuhnya maksimal sesuai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan berkelanjutan pada aspek sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi media informasi digital agar strategi publik yang dijalankan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih efektif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. (2020). *Manajemen Strategi, Teori-Konsep-Kinerja*. Jakarta : Mitra wacana media .
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan Kombinasi (Mixed*. Bandung : Alfabeta.
- Kinanti Sifa Sulisthiawati, A. R. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN BANDUNG. *VOL. 02 NO. 01 | 2025*, 2-15.
- Windi Dwi Arista, W. S. (2019). MPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG. *Vol 3, No. 1, Februari 2019*, 2-10.
- Nur Rohman, E. W. (2021). STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA. *Volume 8 Nomor 1*,

Bulan April Tahun 2021, 1-10.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK